

Research Article

Challenges of Government Ethics in Human Resource Governance in Village Government in the Digital Era

Hikmah Muhaimin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit

E-mail: hikmahmuhaimin@gmail.com

Azzara Rum Mawangi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit

E-mail: azzararummawangi@gmail.com

Desi Nur Vitasari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit

E-mail: dessyvisr@gmail.com

Nasihul Amin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit

E-mail: nasikhul863@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by Diplomasi: Jurnal Politik, Demokrasi dan Pemerintahan.

Received : May 30, 2024

Revised : June 18, 2024

Accepted : 30 June 2023

Available online : July 29, 2024

How to Cite: Hikmah Muhaimin, Azzara Rum Mawangi, Desi Nur Vitasari, & Nasihul Amin. (2024). Challenges of Government Ethics in Human Resource Governance in Village Government in the Digital Era. *Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(3), 108–122. <https://doi.org/10.58355/dpl.v2i3.39>

Abstract. Government ethics is a set of standards that regulate the behavior of officials in carrying out their responsibilities. These standards are based on important values, including accountability, integrity, and morality. Implementing this code of ethics is important to improve the performance of government organizations, especially in the context of Industry 5.0 and the digital era. Qualitative methodology and case study design were used to conduct research in Village Government. The results show that digitalization has an impact on human resource governance in villages which in turn has an impact on changes in data administration, work methodology and competencies. To achieve success in the context of digital transformation, it is necessary to increase digital literacy and apply information and communication technology in rural areas. The aim of this research is to increase the competitiveness and welfare of villages, as well as increase the effectiveness of human

Challenges of Government Ethics in Human Resource Governance in Village Government in the Digital Era

Hikmah Muhaimin, Azzara Rum Mawangi, Desi Nur Vitasari, Nasihul Amin

resource management in village government, encouraging the progress of sustainable and efficient government ethics in the digital era and Industry 5.0.

Keywords: Government Ethics, Code of Ethics, Human Resources, Digitalization.

Tantangan Etika Pemerintah Dalam Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pada Pemerintah Desa Di Era Digital

Abstrak : Etika pemerintahan merupakan seperangkat standar yang mengatur perilaku pejabat dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Standar-standar ini didasarkan pada nilai-nilai penting, termasuk akuntabilitas, integritas, dan moralitas. Penerapan kode etik ini penting untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintah, khususnya dalam konteks Industri 5.0 dan era digital. Metodologi kualitatif dan desain studi kasus digunakan untuk melakukan penelitian di Pemerintahan Desa. Hasilnya menunjukkan bahwa digitalisasi berdampak pada tata kelola sumber daya manusia di desa yang pada gilirannya berdampak pada perubahan administrasi data, metodologi kerja, dan kompetensi. Untuk mencapai keberhasilan dalam konteks transformasi digital, perlu dilakukan peningkatan literasi digital dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di pedesaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan desa, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia dalam pemerintahan desa., mendorong kemajuan etika pemerintahan yang berkelanjutan dan efisien di era digital dan Industri 5.0.

Kata Kunci: Etika Pemerintah, Kode Etik, Sumber Daya Manusia, Digitalisasi.

PENDAHULUAN

Etika pemerintahan merupakan seperangkat norma dan perilaku yang mengatur perilaku pejabat pemerintah dan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Norma dan perilaku ini dituangkan dalam konvensi dan peraturan yang telah ditetapkan. Etika pemerintahan didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan tatanan alam, martabat manusia, dan masalah kebenaran dan kelayakan moral. Pegawai pemerintah diharuskan mematuhi prosedur disipliner, menunjukkan perilaku hormat dan pantas, serta memberikan layanan publik yang sopan dan bermanfaat (Muhaimin et al., 2023).

Karakteristik moral dan kognitif pegawai birokrasi pada dasarnya berkaitan dengan etika pemerintahan. Profesionalisme, dedikasi, dan kompetensi tingkat tinggi diperlukan bagi pejabat pemerintah. Penting juga bagi mereka untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kewajiban dan tanggung jawab mereka ketika melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemerintahan. Tujuan etika pemerintahan adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah secara profesional

Challenges of Government Ethics in Human Resource Governance in Village Government in the Digital Era

Hikmah Muhaimin, Azzara Rum Mawangi, Desi Nur Vitasari, Nasihul Amin

dan tidak memihak. Hal ini dicapai melalui penerapan kode etik dan peraturan yang berlaku bagi seluruh pegawai pemerintah.

Penerapan etika pemerintahan sangat penting bagi peningkatan kinerja organisasi. Pejabat pemerintah harus menjadi teladan dalam penerapan konstitusi, etika, dan hukum. Mereka harus menjadikan diri mereka sebagai kekuatan pendorong yang berperilaku profesional, adil, dan jujur. Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan bersih, sangat penting untuk memasukkan etika pemerintahan ke dalam sistem pemerintahan, yang akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pejabat pemerintah.

Tata kelola sumber daya manusia (SDM) dihadapkan pada kendala yang cukup besar di era digital. Setiap individu, keluarga, pemerintah, masyarakat, termasuk dunia pendidikan dan korporasi harus meningkatkan kecakapan sumber daya manusianya guna mengarungi era industri 5.0. Evolusi lingkungan kerja dan metodologi kerja menjadi kendala utama dalam penyelenggaraan sumber daya manusia di era digital. Karyawan harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan memahami metodologi kerja baru. Selain itu, organisasi harus memiliki kapasitas untuk mengelola data karyawan secara efektif dan menjamin keamanannya. Pengaruh transformasi digital terhadap sumber daya manajemen manusia profesional menyebabkan meningkatnya peluang dan permasalahan. Di era digital, muncul tantangan baru terkait keamanan dan privasi data karyawan. Organisasi wajib mematuhi peraturan mengenai privasi dan keamanan data karyawan.

Dalam pengelolaan sumber daya manusia, pemerintah desa menghadapi berbagai tantangan etika. Kewenangan pemerintah desa seringkali mempengaruhi etika dan moralitas pengambilan keputusan. Dalam posisi unik ini, pejabat pemerintah berkewajiban memenuhi tanggung jawab besar terhadap negara dan masyarakat. Meski demikian, perolehan kekuasaan menghadirkan hambatan moral yang harus diatasi, seperti korupsi dan tekanan untuk mengambil keputusan. Pemerintah harus menjamin pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Era digital telah mengakibatkan semakin kompleks dan kompleksnya tantangan etika pemerintahan. Hal ini akan menimbulkan masalah yang lebih rumit jika tidak berhasil diselesaikan (Darmawati et al., 2023).

Etika pemerintahan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia. Etika dalam pemerintahan mengacu pada prinsip dan nilai moral yang mengarahkan tindakan dan keputusan

Challenges of Government Ethics in Human Resource Governance in Village Government in the Digital Era

Hikmah Muhaimin, Azzara Rum Mawangi, Desi Nur Vitasari, Nasihul Amin

pemerintah. Penerapan etika pemerintahan merupakan faktor penting dalam pengembangan pelayanan yang efektif, transparan, akuntabel, dan untuk kepentingan umum dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia.

Beberapa aspek baru juga masuk dalam tantangan etika pemerintah dalam pengelolaan SDM di era digital. Pada awalnya, meningkatnya keterbukaan pasar global mengakibatkan meningkatnya persaingan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia dari negara tetangga. Kedua, meningkatnya kebutuhan akan keterampilan digital dan pemahaman teknologi yang komprehensif. Ketiga, pesatnya akselerasi transformasi digital di berbagai ranah kehidupan. Keempat, meningkatnya tuntutan tanggung jawab cepat dari ASN dan meningkatnya arus keterbukaan informasi. Dalam jurnal ini akan dikaji kendala-kendala yang dihadapi etika pemerintahan di era digital pemerintahan desa dalam hal pengelolaan sumber daya manusia. Kami akan menyelidiki potensi teknologi dan data untuk meningkatkan efektivitas dan efektivitas pemerintahan, serta cara-cara pemerintah desa dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam pengelolaan sumber daya manusia. Selain itu, kami juga akan mempertimbangkan cara-cara yang dapat dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dan keberlanjutan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan keseimbangan kekuasaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan desain studi kasus. (Assyakurrohim et al., 2022) berpendapat bahwa Studi kasus adalah penyelidikan yang teliti dan menyeluruh yang dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan utuh mengenai suatu program, peristiwa, atau tindakan, baik yang berkaitan dengan seseorang, kelompok, lembaga, atau organisasi. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memahami dan menilai tantangan etika yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya manusia di pemerintahan desa di era digital.

Teknik ini digunakan untuk memahami dan mencermati tantangan etika yang dihadapi di era digital Pemerintahan Desa dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pemanfaatan studi kasus memungkinkan identifikasi dan analisis dilema etika yang rumit dan tepat terkait manajemen sumber daya manusia di era digital. Strategi ini secara khusus dikembangkan untuk mewujudkan kota yang menunjukkan tata kelola yang kuat dalam kaitannya dengan masyarakat dan sumber daya alam. Tujuannya adalah untuk menjamin masyarakat mempunyai daya saing ekonomi yang tinggi. Desa di era digital menghadapi banyak tantangan, antara lain Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), persaingan di pasar bebas,

terbatasnya kesadaran pemerintah daerah terhadap UU Desa, permasalahan sumber daya manusia, terbatasnya akses terhadap layanan bagi masyarakat desa, dan kebutuhan masyarakat desa. untuk pemberdayaan masyarakat desa (Nur et al., 2023).

Metodologi penelitian kualitatif yang digunakan dalam studi kasus ini melibatkan perolehan data melalui survei, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Tujuannya adalah untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan faktor-faktor pendukung yang menunjang keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana etika pemerintahan diterapkan dalam pengelolaan sumber daya manusia di era digital. Etika pemerintahan. Temuan investigasi ini berpotensi meningkatkan efektivitas dan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia di pedesaan (Assyakurrohim et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan Desa

Pemerintah desa menghadapi beberapa tantangan dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia dan tata kelola yang beretika di era digital. Salah satu kesulitan yang harus diatasi adalah perlunya tata kelola yang efektif, daya saing, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia di pemerintahan desa semakin rumit sebagai akibat dari dampak kemajuan teknologi dan pergeseran pasar global. Pemerintahan desa mempunyai kendala yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan desa secara otonom, pemberdayaan masyarakat desa, pengorganisasian kelembagaan desa, pengawasan pembangunan desa, pengelolaan badan usaha desa (BUD), penanganan keuangan desa, dan penegakan peraturan desa. Aparatur pemerintahan desa harus siap dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan prinsip-prinsip utama yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat, percepatan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus dilaksanakan di tingkat desa. Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Anggaran, Pelayanan IT, dan Standar Pelayanan Administrasi Desa/Kelurahan merupakan faktor penentu keberhasilan dalam mewujudkan keberhasilan e-Government dalam pelayanan administrasi desa berbasis IT. Di banyak daerah terpencil, infrastruktur telekomunikasi dan akses internet masih langka, sehingga menyulitkan masyarakat pedesaan untuk menjalin koneksi dengan teknologi digital. Perkembangan

komunitas digital juga dapat terhambat oleh langkanya sumber daya manusia yang mahir dalam teknologi digital.

Kendala Dalam Pengelolaan Sumberdaya manusia (SDM)

Pemerintah desa menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola sumber daya manusia (SDM) di era digital. Di era digital, sumber daya manusia merupakan salah satu aset paling berharga bagi pemerintah desa karena mereka memiliki kapasitas untuk mengelola informasi secara efektif dan berinteraksi dengan masyarakat. Meskipun demikian, tantangan etika yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia dalam pemerintahan desa cukup besar (Sutrisno & Asmaroini, 2024).

Pada awalnya, tantangan etika dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam pemerintahan desa adalah perlunya peningkatan literasi digital. Literasi digital mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang digunakan pada berbagai perangkat digital, termasuk PC desktop, laptop, tablet, dan ponsel pintar. Literasi digital sangat penting di era digital untuk menjamin sumber daya manusia dapat mengelola informasi dan berinteraksi dengan masyarakat secara efektif. Literasi digital sangat penting dalam konteks pemerintahan desa untuk menjamin sumber daya manusia dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pemerintahan (Achmad Pradana et al., 2023).

Kedua, tantangan etika dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam pemerintahan desa adalah perlunya menumbuhkan etika digital yang lebih kuat. Etika digital merupakan standar moral yang diterapkan dalam berbagai perangkat digital. Etika digital sangat penting di era digital untuk menjamin SDM dapat menggunakan teknologi digital dengan cara yang tepat dan tidak merugikan orang lain. Untuk menjamin sumber daya manusia dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan keamanan dan integritas data pemerintah dalam konteks pemerintahan desa, maka etika digital sangatlah penting.

Ketiga, tantangan etika dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam pemerintahan desa adalah perlunya menumbuhkan demokrasi digital yang lebih efektif. Demokrasi digital adalah sistem yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Untuk menjamin masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengelolaan pemerintahan dan lebih efektif memantau kegiatan pemerintahan dalam konteks pemerintahan desa, diperlukan demokrasi digital.

Challenges of Government Ethics in Human Resource Governance in Village Government in the Digital Era

Hikmah Muhaimin, Azzara Rum Mawangi, Desi Nur Vitasari, Nasihul Amin

Keempat, persoalan etika dalam pengelolaan sumber daya manusia di pemerintahan desa terletak pada perlunya membina kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Kemitraan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah desa dapat menggunakan teknologi digital dengan sukses dan efisien. Kemitraan ini sangat penting dalam kerangka tata kelola desa untuk menjamin masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mengawasi jalannya pemerintahan dengan lebih efisien.

Kelima, tantangan etika dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam pemerintahan desa adalah perlunya membangun sistem informasi yang lebih efektif. Untuk menjamin pemerintahan desa dapat memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan efisien, maka sangat penting untuk menerapkan sistem informasi yang lebih baik. Untuk menjamin masyarakat dapat terlibat dalam pengelolaan pemerintahan dan memantau kegiatan pemerintah dengan lebih efektif, diperlukan sistem informasi yang lebih efektif dalam konteks pemerintahan desa.

Kesimpulannya, tantangan etika yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia dalam pemerintahan desa di era digital sangatlah penting. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah desa harus meningkatkan sistem informasinya, berkolaborasi dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan pemerintah, serta mendorong literasi digital, etika digital, dan demokrasi digital. Dengan cara ini, pemerintah desa dapat meningkatkan keamanan dan integritas data pemerintah dengan memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan efisien (Fajriyani et al., 2023).

Tata Kelola Sumberdaya Alam (SDA):

Efektivitas tata kelola sumber daya alam di desa mungkin akan sangat dipengaruhi oleh terbatasnya kemampuan sumber daya manusia. Kurangnya kemampuan desa dalam mengelola sumber daya alam mungkin disebabkan oleh rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam memanfaatkan potensi sumber daya tersebut. Akibatnya, seluruh potensi sumber daya alam belum teraktualisasikan (Jamaludin et al., 2020).

Masyarakat pedesaan di Indonesia seringkali mengalami kekurangan individu terampil yang mampu mengelola potensi sumber daya alam mereka secara efektif. Namun demikian, pemanfaatan teknologi informasi untuk keperluan pengawasan sumber daya alam di pedesaan mungkin terhambat karena kurangnya kemampuan sumber daya manusia. Permasalahan ini muncul karena kurangnya pemahaman terhadap teknologi informasi dan kurangnya bantuan dari pemerintah

daerah untuk meningkatkan aksesibilitas sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi.

Akibatnya, tata kelola sumber daya alam di pedesaan dapat terhambat secara signifikan akibat tidak adanya kompetensi sumber daya manusia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah, provinsi, dan pemerintah desa harus bekerja sama untuk meningkatkan daya saing internasional dan memperluas jumlah pusat kompetensi sumber daya manusia di desa.

Tata Kelola Sumber Daya Manusia (SDM)

Di era digital, pemerintahan desa menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola sumber daya manusia. Kurangnya pemahaman pemerintah desa terhadap UU Desa merupakan salah satu kendala besar yang akan dihadapi desa di masa depan. Selain itu, desa juga menghadapi kendala dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, akses terhadap layanan, dan sumber daya manusia. Dalam konteks ini, kesiapan dan kapasitas aparat pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan juga penting (Alhababy, 2016).

Tantangan ini menekankan perlunya peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa dalam mengelola sumber daya manusia, serta pemahaman menyeluruh terhadap peraturan terkait, seperti UU Desa. Selain itu, pemerintah desa juga harus memprioritaskan perluasan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa. Di era digital, penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan pemerintah desa. Meski demikian, hal ini memerlukan ketersediaan sumber daya manusia, prasarana, sarana, dan anggaran fungsional.

Standar etika pemerintahan dan administrasi negara juga penting dalam konteks ini. Ada cara untuk mengatur tugas pokok, fungsi, dan wewenang penyelenggaraan negara melalui etika ketatanegaraan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk mempertimbangkan etika dalam menjalankan operasionalnya, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia di era digital.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah desa harus memprioritaskan hal-hal berikut: peningkatan kapasitas aparturnya, pemberdayaan masyarakat desa, berpegang pada prinsip etika profesi dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi, dan pemahaman menyeluruh terhadap peraturan terkait. Dengan cara ini, pemerintah desa dapat menciptakan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien di era digital.

Challenges of Government Ethics in Human Resource Governance in Village Government in the Digital Era

Hikmah Muhaimin, Azzara Rum Mawangi, Desi Nur Vitasari, Nasihul Amin

Pemanfaatan teknologi digital dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengelolaan sumber daya manusia di wilayah pedesaan. Berikut beberapa faktor yang berdampak:

1. Keunggulan Kompetitif dan Modernisasi Fungsi SDM: Dengan memodernisasi fungsi SDM, digitalisasi memungkinkan perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif. Perlu dilakukan modifikasi metodologi kerja dan kompetensi SDM.
2. Perubahan Permintaan Kompetensi SDM: Permintaan kompetensi SDM diperkirakan akan berubah sebagai konsekuensi digitalisasi. Dalam hal ini, pentingnya digitalisasi bagi sumber daya manusia dan meningkatnya kebutuhan akan kemampuan digital telah diamati.
3. Literatur menilai dampak digitalisasi saat ini terhadap kompetensi dan fungsi profesional SDM, serta manfaat dan bahaya utamanya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa para profesional HR agak ragu untuk menerapkan teknologi ini.
4. Integrasi teknologi digital ke dalam pengelolaan SDM merupakan pendekatan strategis dalam pengelolaan SDM yang bertujuan untuk meningkatkan efikasi dan efektivitas operasional. Selanjutnya, fungsi manajemen kinerja mengintegrasikan hasil penilaian kinerja individu dan tim secara online, pencapaian kinerja tahunan untuk seluruh posisi, dan rencana pengembangan SDM.

Untuk mewujudkan desa yang maju, pemerintah desa harus secara aktif mendorong penerapan inisiatif masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, penting untuk memberikan pendidikan yang komprehensif dan berkualitas tinggi kepada masyarakat desa. Pemerintah harus menjamin seluruh masyarakat desa mempunyai kemampuan memanfaatkan masyarakat dan sumber daya alamnya secara maksimal melalui otonomi daerah. Konsep kedua adalah memungkinkan tercapainya masyarakat yang layak secara ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang efektif. Ke depan, komunitas ini akan menghadapi dua tantangan tersendiri: terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean (AEC) dan adanya persaingan pasar bebas (Nursetiawan, 2020).

Pendekatan untuk mewujudkan desa sejahtera dan otonom adalah dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan inisiatif pembangunan desa. Hal ini juga mencakup perbaikan tata kelola desa melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perbaikan pengelolaan keuangan desa (Lindawaty, 2012).

Peran Pemerintah Desa Dan Kebijakan Pemerintahan

Perkembangan kebijakan desa sangat dipengaruhi oleh pemerintah desa. Hal ini mencakup penetapan kebijakan pembangunan desa secara nasional, pemerataan sumber daya dan anggaran pembangunan desa di seluruh Indonesia, pemberian bantuan teknis dan keuangan kepada pemerintah daerah dan desa dalam pelaksanaan Meningkatkan kebijakan pembangunan desa dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa. pembangunan pedesaan. Sistem perencanaan dan pembangunan desa merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia. Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, pemerintah harus menetapkan kebijakan yang lebih komprehensif yang mencakup penyediaan dukungan keuangan yang memadai, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam perencanaan, dan pendidikan masyarakat mengenai pentingnya perencanaan pembangunan (Nardin, 2019).

Masyarakat desa diberdayakan melalui berbagai kegiatan, termasuk fasilitasi dan promosi partisipasi aktif mereka dalam pembangunan desa. Sebagai generasi yang kreatif dan inovatif, generasi muda mempunyai potensi untuk menyumbangkan ide, pemikiran, dan solusi yang dapat memfasilitasi pembangunan desa yang lebih sejahtera dan sukses. Peluang untuk mewujudkan pemerintahan desa yang lebih maju dan efektif di masa depan dapat dilihat dari keterlibatan generasi muda dalam pemerintahan desa.

Di era digital, ada beberapa aspek yang memerlukan pertimbangan matang dalam mengelola sumber daya manusia di pemerintahan desa. Daerah pedesaan memiliki tantangan seperti permasalahan sumber daya manusia, terbatasnya akses layanan bagi warga desa, dan perlunya pemberdayaan kelompok tersebut. Masyarakat desa yang berdaya saing dan mandiri tidak dapat dibangun hanya melalui otonomi desa. Penting juga untuk menilai kesiapan dan kapasitas aparat pemerintah desa dalam melaksanakan program-program yang diperlukan. Untuk meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan, penting untuk memberikan penekanan yang kuat pada inovasi, tenaga kerja terampil, sumber daya alam, dan tata kelola yang efektif. Faktor-faktor ini sangat penting untuk menumbuhkan tata kelola yang baik dan meningkatkan daya saing, yang pada akhirnya akan mengarah pada kemandirian desa (Wildanu, 2019).

Salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan menetapkan peta jalan yang jelas dan membangun sumber daya manusia yang terkonsolidasi dengan baik, yang didukung oleh anggaran yang

Challenges of Government Ethics in Human Resource Governance in Village Government in the Digital Era

Hikmah Muhaimin, Azzara Rum Mawangi, Desi Nur Vitasari, Nasihul Amin

tepat sasaran. Serangkaian upaya terus dilakukan untuk mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia guna mewujudkan seluruh potensi masyarakat Indonesia, termasuk pembangunan manusia. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai kemanusiaan merupakan cerminan dari tekanan yang dilakukan manusia terhadap martabat, hak, dan kewajiban manusia. baik dari segi etika dan estetika, serta logika.

Pemberdayaan masyarakat desa juga penting untuk mewujudkan desa yang sejahtera dan mandiri. Sangat penting untuk memberdayakan masyarakat desa untuk meningkatkan otonomi mereka dan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan. Berlakunya UU No.6/2014 tentang Desa telah memberikan peluang bagi setiap desa untuk mencapai kemandirian. Namun kelemahan pemerintah desa dan tidak adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dana desa menjadi faktor utama penyebab tidak efektifnya pemanfaatan dana desa.

Reformasi Birokrasi

Mutu penyelenggaraan pemerintahan secara konsisten ditingkatkan melalui perolehan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang harus dibarengi dengan ketaatan pada standar etika, moral, dan peraturan. Salah satu tantangan yang dihadapi birokrasi pemerintah adalah reformasi ketertiban dan perilaku, serta peningkatan integritas dan sistem pengendalian internal lembaga pemerintah. Konsekuensi logis ini mengharuskan birokrasi pemerintah secara konsisten meningkatkan kualitasnya dengan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan, yang harus dibarengi dengan dedikasi terhadap standar etika, moral, dan peraturan. Untuk mengatasi kendala tersebut, enam strategi pengelolaan SDM yang efektif diterapkan, antara lain: ASN harus dibudayakan sebagai sumber daya yang paling prospektif dalam birokrasi pemerintah guna mengoptimalkan kinerja birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas birokrasi pemerintah dalam melakukan pengawasan secara baik sangat dipengaruhi oleh tidak efektifnya pengawasan, karena mayoritas ASN masih menunjukkan integritas yang rendah. Di era reformasi ini, media akan dengan cepat memprioritaskan tindakan, sikap, dan perilaku birokrasi pemerintah; Akibatnya, pengawasan ini menjadi semakin signifikan. Hal ini mencakup platform media sosial seperti Facebook dan Twitter, serta media massa elektronik dan cetak. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penerapan zona integritas guna mewujudkan pelayanan publik yang unggul dan pemerintahan yang bersih dan akuntabel (Fahri, 2021).

Challenges of Government Ethics in Human Resource Governance in Village Government in the Digital Era

Hikmah Muhaimin, Azzara Rum Mawangi, Desi Nur Vitasari, Nasihul Amin

Organisasi birokrasi formal disusun berdasarkan jabatan dan gaya kerja yang diatur, komitmen terhadap pelayanan publik, perbedaan yang jelas antara milik organisasi dan individu, kompetensi yang ditentukan oleh jabatan atau wewenang, dan sumber daya organisasi yang rentan terhadap pengaruh eksternal. pengawasan. Kualitas pemerintahan dapat dievaluasi secara efektif dengan mengevaluasi karakter pelayanan publik yang diterima masyarakat. Penyelenggaraan kegiatan pemerintah menimbulkan kewajiban-kewajiban yang timbul pada saat berkembangnya pelayanan public (Endah & Vestikowati, 2021).

Tujuan utama reformasi birokrasi adalah melaksanakan reformasi dan modifikasi mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, dengan fokus khusus pada komponen kelembagaan (organisasi), manajemen (proses bisnis), dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi aparatur negara dalam melaksanakan tanggung jawab umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

KESIMPULAN

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola yang beretika menghadirkan beragam tantangan bagi pemerintahan desa di era digital. Tantangan-tantangan ini mencakup perlunya tata kelola yang baik, daya saing yang tinggi, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, terutama mengingat kemajuan teknologi dan perubahan lanskap pasar global. Diperlukan kesiapan dan kapasitas yang memadai dari aparat pemerintah desa untuk melaksanakan beragam program dan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, mengingat kompleksitas situasi yang ada (Lailiyah, 2022).

Di era digital, pentingnya memasukkan etika pemerintahan ke dalam pengelolaan sumber daya manusia, khususnya dalam konteks pemerintahan desa. Kesimpulan penelitian ini memperoleh sejumlah wawasan penting, termasuk:

1. Peran Penting Etika Pemerintahan: Pegawai pemerintah mampu melaksanakan tugasnya secara profesional, berintegritas, dan penuh dedikasi apabila menjunjung tinggi etika pemerintahan yang baik. Hal ini meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat lokal dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
2. Tantangan Era Digital: Pengelolaan sumber daya manusia dihadapkan pada tantangan besar akibat transformasi digital, seperti modifikasi keterampilan, metode kerja, dan keamanan data di era digital. Efektivitas dan kemandirian

Challenges of Government Ethics in Human Resource Governance in Village Government in the Digital Era

Hikmah Muhaimin, Azzara Rum Mawangi, Desi Nur Vitasari, Nasihul Amin

- pelayanan publik harus dijamin oleh kemampuan pemerintah desa dalam melakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut.
3. Literasi Digital: Upaya peningkatan literasi digital di tingkat desa perlu dilaksanakan guna memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini akan memberdayakan masyarakat pedesaan untuk merangkul revolusi digital dan meningkatkan standar hidup mereka.
 4. Pengaruh digitalisasi terhadap SDM: Fungsi SDM dimodernisasi melalui digitalisasi, yang memberikan keunggulan kompetitif. Namun hal ini memerlukan modifikasi terhadap tuntutan keterampilan SDM dan fungsi profesional SDM, serta pemanfaatan teknologi yang lebih terbuka.
 5. Integrasi Teknologi Informasi: Penerapan teknologi informasi pada pemerintahan desa berpotensi meningkatkan efektivitas dan efektivitas pelayanan pemerintahan desa. Meskipun demikian, tantangan utama di banyak daerah pedesaan adalah permasalahan infrastruktur dan kurangnya akses terhadap tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknologi. Pemerintah pusat, pemerintah negara bagian, dan pemerintah desa semuanya diperlukan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah pusat kompetensi di desa dan meningkatkan daya saing internasional.

Studi ini memberikan wawasan yang signifikan mengenai penerapan tata kelola yang beretika secara efektif dalam konteks digitalisasi dan metode yang dapat digunakan desa untuk mengatasi hambatan yang ada dalam mencapai tata kelola yang baik dan memiliki daya saing yang tinggi (Amalina Saputri et al., 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Pradana, R., Pitaloka, D., Laduni Rukmana, I., & Gunawan, A. (2023). Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Digital: Keterampilan dan Peran di Era Digital. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(09), 1806–1817. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.583>
- Alhababy, A. M. (2016). *pemberdayaan masyarakat: dialektika partisipasi publik dan pembangunan* (Vol. 14, Issue 5).
- Amalina Saputri, L., Iqbaal Maulana, M., Kholik Istiqomah, N., & Ratnawati, I. (2024). 77141-75676721974-1-Sm. *Manajemen Business Innovation Conference-MBIC*, 4(Optimalisasi UMKM Melalui Transformasi Digital), 902–919.
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi

Challenges of Government Ethics in Human Resource Governance in Village Government in the Digital Era

Hikmah Muhaimin, Azzara Rum Mawangi, Desi Nur Vitasari, Nasihul Amin

- Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Darmawati, Syahril, S., & Harianti, I. (2023). Integritas Moral Dalam Konteks Pengambilan Keputusan Di Desa Bontobaru Kabupaten Kepulauan Selayar. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 14(1), 49–60. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v14i1.593>
- Endah, K., & Vestikowati, E. (2021). Birokrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal MODERAT*, 3(3), 648.
- Fahri, M. (2021). Potret Reformasi Birokrasi Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Dinamika*, 1(1), 6–10. <https://doi.org/10.54895/dinamika.v1i1.767>
- Fajriyani, D., Fauzi, A., Devi Kurniawati, M., Yudo Prakoso Dewo, A., Fahri Baihaqi, A., & Nasution, Z. (2023). Tantangan Kompetensi SDM dalam Menghadapi Era Digital (Literatur Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(6), 1004–1013. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i6.1631>
- Jamaludin, Sirajudin, Thamrin, Mustakim, M., & Jakariah. (2020). Loyalitas Kreativitas Abdi Masyarakat Kreatif Loyalitas Kreativitas Abdi Masyarakat Kreatif. *Jurnal LOKABMAS Kreatif*, 01(03), 63.
- Lailiyah, K. (2022). Digitalisasi Desa Sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang*, 6(2), 26–34. <https://doi.org/10.55686/ristek.v6i2.112>
- Lindawaty, D. S. (2012). Dukungan Pemerintah terhadap Otonomi Desa: Perbandingan Indonesia dan Cina. *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri & Hubungan Internasional*, 3(2), 243–271. <http://ruslidjamik.wordpress>.
- Muhaimin, H., Ichwan, W., Basith, R. A., Veryanto, D. R., Kunci, K., Pemerintahan, E., Pelayanan, ;, & Kepercayaan, P.; (2023). Etika Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Layanan Publik Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Kepercayaan Masyarakat. *Journal Law and Government*, 1(2), 122–132.
- Nardin, Y. (2019). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(3), 140–145. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1799>
- Nur, S., Rahmawati, E., Hasanah, M., Rohmah, A., Adytia, R., Pratama, P., Anshori, I., Manajemen, P., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2023). Privasi Dan Etika Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Digital. *Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset*, 1(6), 1–23. <https://doi.org/10.61132/lokawati.v1i6.328>
- Nursetiawaan, I. (2020). Peningkatan Pelayanan Pemerintah Desa Berbasis Smart

Challenges of Government Ethics in Human Resource Governance in Village Government in the Digital Era

Hikmah Muhaimin, Azzara Rum Mawangi, Desi Nur Vitasari, Nasihul Amin

Village. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 112–120.

Sutrisno, S., & Asmaroini, A. P. (2024). Penguatan Etika Warga Digital Di Era Metaverse. *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(4), 722–732. <http://jip.joln.org/index.php/pendidikan/article/view/223>

Wildanu, E. (2019). Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa Berbasis Keterbukaan Informasi Publik. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 13(01), 58–66. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1458>